

SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE

**(Studi Kasus Pada Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) Dalam
Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba)**

ASRAN

105640197714



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

ABSTRAK

ASRAN, *COLLABORATIVE GOVERNANCE* Studi Kasus Pada Komunitas Swabina Pedesaan Salassae Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative govenance* yang dilakukan pemerintah, dan komunitas swabina pedesaan salassae (KSPS) dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Desa Salassae, Serta mengetahui faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi *collaborative governance* di Desa Salassae

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Salassae, dengan menggunakan teori *Collaborative Governance*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih untuk pemeriksaan keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* di Desa Salassae dalam *Commitment to a common purpose* yaitu penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi, pertanian organik. Sedangkang dalam *Trust among the participants* yaitu menjalankan program lembaga, pengelolaan lembaga, pendanaan kegiatan lembaga. Adapun faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* yaitu kesadaran para *steacholder* dan dorongan dari internal lembaga maupun masyarakat petani organik.

Kata kunci: *collaborative governance*, kedaulatan pangan, komunitas swabina pedesaan salassae (KSPS)

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : *COLLABORATIVE GOVERNANCE*, Studi Kasus Pada Komonitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba

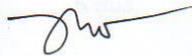
Nama mahasiswa : ASRAN

Nomor Stambuk : 105640197714

Program studi : Ilmu Pemerintahan

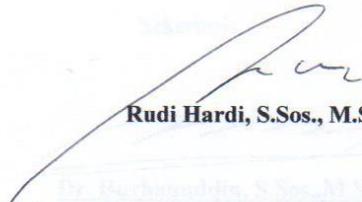
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

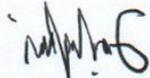
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 1361/FSP/A. 1 – VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

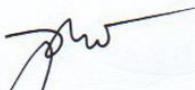
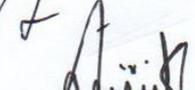


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM ()
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si ()
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ()
4. Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : ASRAN

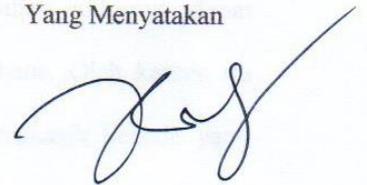
Nomor Stambuk : 105640197714

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa banar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 16 April , 2018

Yang Menyatakan



ASRAN

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunianya semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul “COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA SALASSAE Studi Kasus Pada Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) Terkait Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Untuk kedua orang tua penulis yang selama ini selalu membimbing serta mengarahkan kearah yang lebih baik, dan telah memberikan dukungan moril serta pengorbanan materi selama ini dengan sabar mengajari penulis disetiap kesalahan-kesalahan yang di perbuat oleh penulis. Untuk kasih sayang yang selalu diberikan penulis. Terima Kasih untuk semuanya.

2. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak_Rudi Hardi S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Untuk Kakanda Irwan Alim S.Ip M.Si Selaku orang yang selalu memberikan dukungan dan semangat mendampingi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2011 dan seluruh pihak yang tidak sempat di sebutkan satu persatu namanya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kaki di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin! Sekian dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 7 Juli 2018

ASRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABLE	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	8
B. Konsep Kedaulatan Pangan	13
C. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat.....	16
D. Kerangka Pikir	19
E. Focus Penelitian.....	21
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian	23
--------------------------------------	----

B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan.....	24
E. Teknik Pebgumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data	26
G. Keabsahan Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Penelitian	28
B. Bentuk Collaborative Governance Di Desa Salassae	47
C. Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	25
Tabel 4.1	32
Tabel 4.2	33
Tabel 4.3	34
Tabel 4.4	35
Tabel 4.5	36
Tabel 4.6	37
Tabel 4.7	39
Tabel 4.8	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang\

Kondisi petani Indonesia pada abad ke 21 ini harus bertahan dari hantaman kebijakan globalisasi neoliberalisme, petani Indonesia bagaikan orang yang telah jatuh dari tangga, dan kemudian tangga tersebut menyimpannya. Di tengah petani Indonesia yang tak menguasai dan memiliki tanah, petani Indonesia diserbu oleh pasar Internasional. Akibatnya petani kecil di Indonesia tersebut semakin termarginalkan. Hal tersebut bisa kita pandang dari petani kita yang tak dapat bersaing dengan pesatnya impor kedelai, bawang putih, jagung dari Amerika dan juga Brasil. Hal ini juga dialami para peternak unggas, sapi perah, dsb. Produk-produk pertanian padi, umbi umbian, dan tanaman lainnya tak bisa berkembang karena harus berhadapan dengan para pesain pengimpor gandum yang besar yang diimpor dari beberapa negara seperti Amerika dan Australia (Saragih, 2015).

Produk pertanian yang saat ini masih berpatokan kepada suatu kelompok berdampak pada dilemanya kemerdekaan bangsa dan rakyat kita, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. *La Via Campesina* yang dan sebagai organisasi perlindungan Serikat Petani Indonesia di kanca Internasional yang telah memperkenalkan konsep kedaulatan pangan ini kepada masyarakat dunia pada *World Food Summit* (WFS) yang digelar pada bulan November 1996 di Italia tepatnya di kota Roma (SPI: 2015).

Kedaulatan pangan dapat tercapai apabila petani dapat menguasai, mengontrol dan memiliki alat-alat produksi panganya yaitu benih, air, tanah, dan teknologi pertaniannya dan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan pembaharuan agraria. Hal tersebut harus disertai dengan pelaksanaan pertanian rakyat yang berkelanjutan, bukan hanya untuk perbaikan kualitas tanah dan lingkungan tapi juga produksi yang sehat untuk kita konsumsi. Program ini seharusnya dilakukan dengan dengan serius sebagai upaya untuk melepaskan dari ketergantungan kepada perusahaan nasional maupun internasional penghasil input pertanian (Saragih, 2015).

Gerakan perjuangan kedaulatan pangan di negara ini mulai terasa dari beberapa tahun yang lalu. krisis pangan memang belum terjadi pada saat ini, namun beberapa tanda mulai tampak. Karena itu berbagai inisiatif sudah dilakukan, gerakan rakyat di Indonesia seperti membentuk koalisi penegakan kedaulatan pangan. Kemudian beberapa seminar juga dilakukan oleh partai di indonesia untuk dapat mengetahui mencari solusi pada masalah pangan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia PDI-P di Bali pada tahun 2006 silam (SPI: 2015).

Pada ruang lingkup parlemen ketergantungan kepada pangan dan ketidak mampunya indonesia menghasilkan produksi pertanian di dalam negeri dijawab oleh undang-undang No. 41/ 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan untuk mencegah peralihan lahan pertanian ke non pangan yang di keluarkan oleh DPR. Krisis pangan pada tahun 2008

dapat menyadarkan berbagai kalangan bahwa untuk meminimalisir ketergantungan pangan di Indonesia, harus di perluas lagi upaya yang kita harus lakukan. bukan hanya sekedar mencegah konversi lahan, tetapi harus diperluas lagi dalam mengatur perdagangan pangan. pada 24 Februari 2011, serikat petani indonesia dan sejumlah organisasi petani, organisasi sosial, LSM, hingga para aktivis membuat suatu Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia karna desakan rakyat saat itu. Petisi Kedaulatan Pangan ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mendesak pemerintah sehingga dapat mengubah sistem pangan dan pertanian yang ada pada saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan Indonesia (Arisaputra, 2015).

Kebangkitan perjuangan kedaulatan pangan mulai muncul seiring dengan adanya respons di tingkat legislasi dengan perubahan undang-undang Pangan No. 7/1996 tentang hak seluruh rakyat terhadap pangan guna menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan. Beberapa organisasi yang terkait dan berkompeten diantaranya SPI, IHCS (*Indonesia Human Right Commission for Social Justice*), Solidaritas Perempuan, Bina Desa dan KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) jugatelah menyampaikan naskahnya untuk merubah undang-undangnya. Dan langkah tersebut melahirkan undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 tentang prinsip-prinsip kedaulatan pangan (Syahyuti dkk, 2015).

Kemudian daripada itu untuk memperkuat hak asasi para petani sebagai kekuatan untuk memproduksi pangan, SPI bersama gerakan sipil lainnya melewati proses yang lama dimulai dari tahun 2000, dan pada

akhirnya berhasil memacu parlemen untuk mengeluarkan undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu NO. 19 tahun 2013. Gerakan rakyat di Indonesia tidak berhenti begitu saja, mereka juga melakukan berbagai upaya dalam pengaturan kembali atau mencabut undang-undang Perkebunan No.18/2004, undang-undang No.7/2004 tentang pengelolaan sumber daya air, undang-undang No. 19/2004 tentang kehutanan, dan undang-undang No. 25/19/2004 tentang penanaman modal, karena dianggap berbenturan dan tidak menguntungkan bagi rakyat (Syahyuti dkk, 2015).

Peran serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengatasi masalah pangan, menegaskan bahwa daerah manapun di negara ini pasti akan ditimpa masalah tersebut, tidak hanya daerah yang memiliki pertanian yang rendah daerah dengan pertanian yang baik pun dapat ditimpa. Hal tersebut terjadi karena terdapat kelangkaan bahan pangan di pasar nasional, yang menyebabkan adanya keterbatasan bagi suatu daerah untuk memasarkan bahan pangannya. Bulukumba merupakan salah satu daerah yang mempunyai pertanian yang tinggi. Berdasarkan data PDRB di Kabupaten Bulukumba, pertanian adalah bagian yang utama dan paling banyak memberi keuntungan bagi perkembangan perekonomian lokal, yaitu sebesar 52,9%. Pertanian yang sangat dikembangkan di kabupaten bulukumba yaitu tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan, .(Hasibulah, 2015).

Badan pusat statistik menunjukkan data Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten bulukumba mencapai 0,8 persen dalam waktu 10 tahun terakhir.

Penduduk di Kabupaten Bulukumba masih berpusat pada kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Gattarang dimana kedua kecamatan tersebut masing-masing memberi kontribusi sebesar 18% dan 12,86% bagi distribusi penduduk di Kabupaten Bulukumba. Bulukkumba merupakan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Lahan pertanian cukup besar yaitu seluas 22.458 Ha dan tersebar di 10 kecamatan yang ada, namun kecamatan yang paling banyak memiliki lahan persawahan adalah Kecamatan Gantarang, yakni sebesar 35,67% dari keseluruhan luas pada lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sebanyak 66% penduduknya bekerja disektor pertanian (BPS, 2017).

Adapun Langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bulukumba dalam upayanya mewujudkan kedaulatan pangan dengan mendorong pertanian padi sebagai perekonomian lokal yang berpotensi ekspor adalah melalui pembuatan bibit padi unggul dan menghasilkan buah yang terbaik di antara padi lainnya. Upayah tersebut dilakukan agar beras yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai beras yang berkualitas ekspor, kementerian pertanian juga telah memberikan perijinan untuk mengekspor beras dengan beberapa persyaratan diantaranya bahwa beras yang dihasilkan adalah jenis beras super dengan menggunakan pupuk organik untuk akhirnya dapat dapat di pasarkan di luar indonesia. (Gempitanews.com, 2017).

Mungkin inilah salah satu penyebab pemerintah desa Salassae menjalin kerja sama dengan komonitas swadaya petani desa salasssae atau di singkat KSPS, komonitas petani ini adalah solusi untuk menegakkan kedaulatan

pangan dengan sistem pertanian organik dan berbasis keluarga serta serta ramah lingkungan. Sejak didirikannya 2011 lalu, saat ini KSPS merupakan komunitas yang besar, namanya sudah merambah ke tingkat desa hingga ke tingkat nasional, tentu hal ini tidak mungkin di sia-siakan oleh pemerintah setempat khususnya pemerintah Desa Salassae, dengan menjalin kerja sama dengan komunitas petani ini tentu adalah hal yang sangat tepat untuk menciptakan kedaulatan pangan.

Adapun masalah yang di alami KSPS dalam menegakkan kedaulatan pangan di Desa Salassae adalah kurangnya kepercayaan dari sebagian petani mengenai upaya KSPS dalam menegakkan kedaulatan pangan, nah maka inilah di perlukan peran serta pemerintah Desa Salassae untuk membantu komunitas petani ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa ketika mereka tak lagi tergantung pada pertanian kimiawi maka mereka akan berdaulat. Karena kunci suksesnya kedaulatan pangan adalah bagaimana kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam mengatur dan mengelolah pangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian dengan judul “COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA SALASSAE, *Studi Kasus Pada Komunitas Swadaya Petani Salassae (KSPS) Terkait Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukkumba*”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana gambaran kolaborasi pemerintah Desa Salassae dan KSPS terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa,

Kabupaten Bulukumba?

2. Faktor apa yang mempengaruhi kolaborasi pemerintah Desa Salassae dan KSPS terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kolaborasi pemerintah Desa Salassae, dan KSPS terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kolaborasi pemerintah Desa Salassae dan KSPS terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kerjasama pemerintah, peranan LSM dan pentingnya kedaulatan pangan khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktik, penelitian ini juga diharapkan memberi sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan strategi baru di dunia pemerintahan. Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* itu adalah melibatkan para pemangku pemerintahan atau non pemerintahan dalam pengambilan keputusan yang bersifat formal untuk membuat atau menerapkan kebijakan-kebijakan dan mengelolah program maupun aset publik (Irawan, 2017).

Jung,et.al mengemukakan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses membentuk, mengemudikan, memfasilitasi, mengrasionalisasi, dan memonitor pengaturan organisasi di sektor menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri (Kurniasih dkk, 2017). Seperti halnya Kirk Emerson et.al berpendapat bahwa proses dan sturktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja, (Mutiarawati dkk, 2017).

Seigler dalam (Kurniasih dkk, 2017) menyampaikan delapan prinsip utama dalam *collaborative governance* yaitu :

- a. Warga masyarakat hrus turut di libatkan dalam produksi barang publik.

- b. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumberdaya dan aset untuk memecahkan masalah publik.
- c. Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan masyarakat.
- d. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik.
- e. Kebijakan harus mengandung kebijakan kolaboratif yang berkelanjutan.
- f. Kebijakan harus mengandung kemitraan yang kolaboratif yang berkelanjutan.
- g. Kebijakan harus strategis.
- h. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik.
- i. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

Konsep collaborative governance menurut Denahue dalam (Mutiarawati dkk, 2017) ialah mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, dan apa inisiatif dari masing-masing *stakeholders* dalam menentukan/ mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek tiga aspek yang memulai inisiatif yaitu :

- a. pemain/pelaku mempunyai tujuan untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar.
- b. Masing masing stakeholders atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi.

- c. hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah di jelaskan di atas mengenai collaborative governance, dapat di tarik sebuah pemikiran bahwa pada dasarnya kebutuhan berkolaborasi mulai muncul ketika adanya saling ketergantungan antar pihak atau *stakeholder*. *Collaborative governance* dapat di artikan sebagai sebuah proses yang saling menguntungkan antara aktor *goverman*. Melalui sudut pandang *collaborative governance* semua tujuan-tujuan yang bersifat positif dapat tercapai dengan baik.

1. Faktor pendukung

Deseve menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam *governance* (Mutiarawati dkk :2017), delapan item tersebut antara lain:

- a. *Networked structure* (struktur jaringan) Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Milward dan Provan dalam (Mutiarawati, 2017) mengategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk yaitu :

- 1) *Self Governance* Model ini tidak terdapat entitas administratif namun demikian masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam

network dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua *stakeholders* ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsensus. *Stakeholders* yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan secara intensif.

2) *Lead Organization* Model ini memiliki entitas administrative sebagai penjaring atau penyedia layanan. Sifatnya lebih tersentralisir. Kelebihannya bisa efisien dan arah jaringan jelas. Kelemahannya, terdapat dominasi dari *lead organization* dan kurangnya komitmen dari anggota yang tergabung. Anggota dalam *network* sebaiknya cukup banyak agar lebih optimal. Jaringan tidak boleh membentuk hirarki, struktur jaringan harus bersifat organis dan sedatar mungkin, semuanya setara baik dalam hal tanggung jawab, hak maupun kewajiban maupun otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama (Sudarmo, 2017).

3) *Network Administrative Organization* (NAO) Model ini memiliki entitas administratif secara tegas untuk mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.

b. *Commitment to a common purpose* jaringan bisa ada karna berkomitmen terhadap suatu tujuan yang positif.

- c. *Trust among the participants* kepercayaan antara pelaku atau peserta yang mempunyai hubungan sosial atau profesional yang yakin bahwa para partisipan dapat menjaga informasi atau usaha-usaha dari pemerintah lainya untuk mencapai suatu tujuan dalam jaringan tersebut.
- d. *Governance* (tatakola yang jelas) Kejelasan dalam tata kelola atau governance, meliputi:
- 1) *Boundary dan exclusivity* menetapkan siapa yang bisa masuk anggota atau tidak masuk anggota dalam jaringan/kolaborasi.
 - 2) *Rules* (aturan-aturan) Menegaskan sejumlah pembatas perilaku anggota yang melakukan sifat menyipang atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di setuju sebelumnya akan di keluarkan, karna ada aturan yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
 - 3) *Self determination* hal ini adalah pembatas bagi jaringan atau kolaborasi karena ada yang bisa dan ada yang tidak boleh menjalankanya.
 - 4) *Network management* yaitu yang mengatur segala tantangan alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Kemudian tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan tersedia sumber finansial yang memadai dan berkesinambungan.
- e. *Access to authority* (pengakses kekuasaan) standar prosedur tersedia dengan baik dan dapat di terima secara menyeluruh.

- f. *Distributive accountability and responsibility* yaitu bersama membagi penataan dan pengelolaan manajemen dalam membuat keputusan agar tanggung jawab untuk mencapai hasil dan tujuan yang di inginkan.
- g. *Information sharing* (berbagi informasi) memudahkan jalan bagi anggota, melindungi identitas seseorang dan membatasi informasi bagi orang luar selama itu di setuju dan diterima oleh semua pihak.
- h. *Access to resources* (akses sumber daya) yaitu penyediaan seluruh sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan seperti sumber daya manusia, sumber keuangan, teknis dan lain-lain.

2. Faktor Penghambat

Terdapat sejumlah faktor yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder*. Partisipasi merupakan hal yang penting, menurut Newman dkk (2004) temuan kami membuka sejumlah isu tentang kendala pada *collaborative governance*. Untuk memahami kendala ini kami menyarankan ada kebutuhan untuk mencari inisiatif partisipasi dalam konteks kebijakan pemerintah, untuk mengeksplorasi cara di mana kebijakan tersebut di interpretasikan dan disahkan oleh para aktor strategis di organisasi lokal dan memeriksa persepsi anggota forum deliberatif sendiri). Partisipasi memang suatu hal yang penting dalam *collaborative governance* tetapi bisa menjadi faktor kendala apabila dalam *collaborative* tidak ada partisipasi dari *stakeholders*.

2. Konsep Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan adalah kebebasan kita untuk memproduksi pangan secara mandiri namun tetap menjunjung nilai budaya lokal yang ada serta berbasis keluarga, berprinsipkan solidaritas dan kebebasan kita untuk menentukan sistem pertanian, perikanan, dan peternakan mana yang cocok tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

La via campesina (organisasi buruh dan petani kecil dunia) yang mendekralasikan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*). Menurut Pranomo Kedaulatan pangan di definisikan sebagai hak setiap orang, masyarakat dan negara untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri, serta melarang praktik perdagangan pangan dengan cara dumpin, (Swastika, 2011).

SPI dalam (Arisaputra, 2015) memberikan tujuh syarat utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitu:

- a. Reformasi agraria atau pembaruan ulang lahan pertanian atas bantuan pemerintah
- b. Hak pangan sepenuhnya di limpahkan kepada rakyat
- c. Sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan
- d. Pemanfaatan pangan di kembalikan kepada pangan bukan sekedar untuk di perjual belikan
- e. Membatasi korporasi untuk menguasai pangan
- f. Penggunaan pangan sebagai senjata tidak lagi di perbolehkan
- g. Untuk rumusan kebijakn pertanian petani di beri hak sepenuhnya

Kedaulatan pangan telah didefinisikan dalam berbagai cara, namun

pengaruh definisi berasal dari Deklarasi Nyéléni (Werkhseiser, 2014): “Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat terhadap pangan yang sehat dan tidak lari dari budaya yang dihasilkan melalui metode yang ramah lingkungan dan ekologis, dan hak mereka untuk menentukan metode pertanian dan pangan mereka sendiri. Kedaulatan pangan menyiratkan hubungan sosial baru yang lepas dari kesenonohan dan ketidaksetaraan antara pria dan wanita, masyarakat, kelompok RAS, kelas sosial dan generasi”.

Ini adalah bagian dari definisi yang jauh lebih panjang yang keluar dari sebuah konferensi mengenai kedaulatan pangan yang mencakup masyarakat dari seluruh dunia, dan yang mencakup banyak kekhawatiran anggotanya. Flora dalam (Werkhseiser, 2014) berpendapat bahwa masuknya "Segala cara gerakan untuk pembebasan dari penindasan, dari Zapatista ke gerakan perempuan" terlalu besar untuk satu gagasan, terutama yang hanya tentang makanan. Namun, isu-isu ini dilihat oleh para pendukung karena secara inheren serta bersinergi dan tak terpisahkan. Memang, pendukung kedaulatan pangan berpendapat bahwa mencoba untuk menangani makanan secara terpisah pasti akan mendukung struktur kekuasaan yang ada saat ini yang tidak adil, Via Campesina, Deklarasi Nyéléni, dalam (Werkhseiser, 2014).

Seperti yang akan kita lihat di bagian di bawah tentang kelayakan komunitas yang terorganisir sendiri, barang-barang yang tampaknya berbeda ini, yang dilihat oleh para aktivis yang terkait secara inheren, dapat dipahami secara koheren karena semua menambah kelestarian diri masyarakat. Aktivis Kedaulatan Pangan, saat itu, menggunakan pangan sebagai dasar dasar yang

mendasar untuk menghubungkan masalah yang tampaknya berbeda dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Rumusan berikut merupakan hasil dari integrasi berbagai konsep yang berkembang. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pangan, kedaulatan pangan perlu di bagi menjadi dua level yang berbeda yaitu level negara dan level rumah tangga. Hal tersebut sama dengan definisi yang paling sering diacu tentang kedaulatan pangan, yaitu “kedaulatan pangan adalah hak masyarakat, komunitas, dan negara-negara untuk menentukan kebijakan pertanian, tenaga kerja, perikanan, makanan, dan tanah mereka sendiri, yang secara ekologis, sosial, budaya, serta ekonomi yang unik sesuai keadaan mereka”. Glipo dan Pascual dalam (Syahyuti dkk, 2015).

Adapun pembagian level yang sebagai mana di atur dalam undang-undang pangan yaitu;

- 1) Level negara, sebagaimana dikatakan Beuchelt dan Virchow dalam (Syahyuti dkk, 2015), bahwa kedaulatan pangan erat kaitanya dengan hak masyarakat, komunitas maupun negara dalam penetapan kebijakan pangan mereka secara bebas, dalam penekanan hak pangan yang cukup sebagai pelindung kebijakan-kebijakan nasional maupun internasional.
- 2) Level rumah tangga, secara ringkas ini dapat di lihat dari bagaimana kebebasan petani dalam mengolah sumber daya mereka sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan bermartabat.

3. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga otonom yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan lingkungan atau sumber daya alam, pengembangan dan manajemen sumber daya manusia. Secara umum LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pada rana masyarakat bawah melalui ciptaan serta bantuan kepada swadaya lokal. LSM merupakan lembaga yang otonom serta non profit dan non pemerintah (Zubaedi, 2013).

Menurut hannan dan peter dalam (Zubaedi, 2013) LSM dapat berperan penting dalam mendukung kelompok-kelompok melalui beberapa upaya yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal dan taktik-taktik untuk memenuhinya.
- b. Melakukan mobilisasi dan menggerakkan usaha aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Merumuskan kegiatan pembangunan yang panjang dan lebih umum serta tepat sasaran.
- d. Menghasilkan dan mengelolah sumber daya eksternal maupun lokal untuk membantu membangun pedesaan.
- e. Pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelompok kegiatan sasaran

Istilah lembaga swadaya masyarakat atau yang di singkat LSM di bentuk

oleh sekretariat bina desa di tengah seminar yang bertempat di ungaran jawa tengah pada tahun 1978, di kalangan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) organisasi ini di sebut organisasi anti pemerintah atau NGO (*Non Government Organization*) namun ini mengganjal karna organisasi NGO sangat banyak padahal ini di khususkan kepada yang organisasi anti pemerintah yang berhubungan langsung terhadap pembangunan. (Baroroh, 2008).

Dalam sejarah perlawanan kita mengenal kata “non” dan “co”, pada masa penjajahan belanda “klompok co” adalah klompok yang bekerja sama dengan pemerintah saat itu, sedangkan “klompok non” adalah klompok yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, hal inilah yang membuat NGO pada saat itu di artikan sebagai kelompok yang anti terhadap pemerintah. Padahal untuk tercapainya tujuan suatu kelompok ataupun organisasi haruslah meperbanyak kerja sama dengan pemerintah (Baroroh, 2008).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian LSM mencakup dua kategori yaitu KSM dan LPSM. Disamping itu ada kategori ketiga yang disebut LSM 5 Jaringan, yaitu suatu bentuk kerja sama antara LSM dalam bidang kegiatan atau minat tertentu (Baroroh, 2008), misalnya :

- a. Sekretariat Bina Desa (SBD), berdiri 1974, merupakan forum dari LSM yang bekerja di kawasan pedesaan.
- b. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), berdiri 1976, merupakan wadah kebersamaan LSM yang memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan.

- c. Forum Indonesia untuk Keswadayaan Penduduk (FISKA), berdiri 1983, merupakan forum LSM yang bergerak dibidang kependudukan.
- d. Forum Kerjasama Pengembangan Koperasi (FORMASI), berdiri 1986, merupakan forum LSM yang bekerja mengembangkan koperasi.
- e. Forum Pengembangan Keswadayaan (Participatory Development Forum- PDF), berdiri 1991, merupakan peningkatan dari Forum Kerjasama LSM – PBB (NGO – UN Cooperation Forum) yang didirikan pada 1988. PDF menggabungkan berbagai LSM berinteraksi dengan Pemerintah, dunia usaha dan badan-badan Internasional dalam suatu forum untuk mengembangkan peran serta berbagai aktor dalam pembangunan.
- f. Forum LSM Yogyakarta, salah satu contoh LSM yang bergerak di dalamnya adalah Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta.

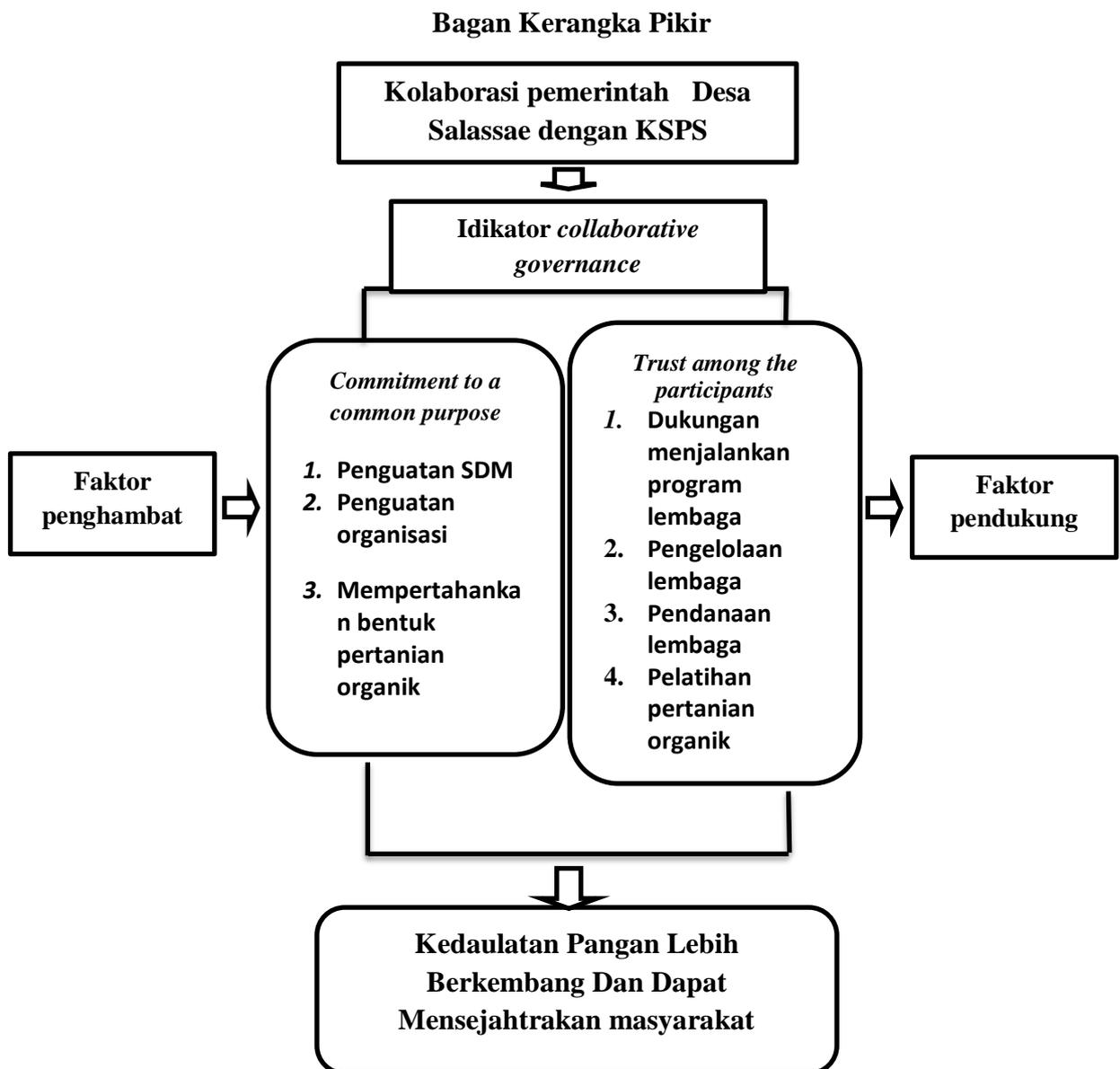
4. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian di atas yang telah di jelaskan dengan beberapa konsep dan teori yang terkait mengenai kolaborasi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dalam kedaulatan pangan di suatu daerah yang dapat dijadikan sebuah dasar kajian adalah tentang konsep-konsep *collaborative governance*, konsep LSM, serta konsep kedaulatan pangan. Untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi yang dilakukan maka penulis akan menganalisis dengan beberapa indikator yang berpengaruh dengan berhasil atau gagalnya kolaborasi antara lain yaitu: *Commitment to a common purpose* dalam Penguatan SDM, Penguatan organisasi, Mempertahankan bentuk pertanian organik, serta *Trust among the participants* dalam Dukungan

menjalankan program lembaga, Pengelolaan lembaga, Pendanaan lembaga, dan Pelatihan pertanian organik.

Dari hasil analisis maka dapat diketahui faktor yang menghambat dan mendukung kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi dengan LSM diharapkan kedaulatan pangan lebih berkembang dan maju di Kabupaten Bulukumba.

Dari uraian kerangka pikir tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



5. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah yang ingin diteliti yaitu bagaimana gambaran *collaborative governance* dalam masalah *commitment to a common purpose* terkait Penguatan SDM, Penguatan organisasi, Mempertahankan bentuk pertanian organik dan masalah *trust among the participants* terkait Dukungan menjalankan program lembaga, Pengelolaan lembaga, Pendanaan lembaga, dan Pelatihan pertanian organik, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kolaborasi pemerintahan dengan lembaga swadaya masyarakat (KSPS) dalam kedaulatan pangan di Desa Salassae kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini

6. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian ini, maka dapat ditemukan Deskripsi fokusnya yaitu:

1. *Collaborative governance*. proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengorasionalisasikan, dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri
2. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap

kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan lingkungan atau sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

3. Kedaulatan pangan. pemenuhan pangan melalui produksi lokal, pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada.
4. *Commitment to a common purpose* jaringan bisa ada karna berkomitmen terhadap suatu tujuan yang positif.
5. *Trust among the participants* kepercayaan antara pelaku atau peserta yang mempunyai hubungan sosial atau profesional yang yakin bahwa para partisipan dapat menjaga informasi atau usaha-usaha dari pemerintah lainnya untuk mencapai suatu tujuan dalam jaringan tersebut.
6. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang mempengaruhi dari tujuan yang ingin dicapai.
7. Tujuan kedaulatan pangan memperkuat akses dan kontrol petani terhadap sumber daya pertanian sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) Desa Salassae. Peneliti memilih tempat tersebut karena KSPS merupakan komunitas yang perlu di contoh untuk solusi penegakan kedaulatan pangan, namun minimnya kerja sama dengan pemerintah Desa Salassae membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti di tempat tersebut. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan setelah ujian proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif mempunyai berbagai sudut pandang teori yang mampu membantu penganalisaan yang lebih konkret kepada fenomena yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah realitanya masyarakat selau berkembang lebih aktif, yang tidak mudah untuk diketahui ukurannya karna bukan cuma sebatas angka-angka. Oleh karena itu, penelitian ini harus lebih dikaji dan diamati secara mendetail dan itu tak sebatas penelitian kualitatif, penelitian ini sangat tergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.
2. Tipe Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang penelitian ditujukan sebagai penggambaran realita dengan

pendapat yang benar. Penelitian ditujukan untuk memperoleh informasi tentang keadaan suatu peristiwa yang ada, yang sesuai dengan realita yang terjadi saat penelitian. Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri ialah membuat pengertian secara terstruktur, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Tapi ternyata, seiring dengan berkembangnya yang semulanya hanyalah untuk menggambarkan tentang apa yang sedang terjadi di saat penelitian sedang berlangsung, ternyata penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengetahui hubungan sebuah variable terhadap variable lainya, bahkan untuk membuat komparasi metode ini juga dapat digunakan.

C. Sumber Data

1. data primer yaitu sebuah data yang dihasilkan peneliti dari hasil pengisian wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Data sekunder yaitu sebuah data yang di dapatkan oleh peneliti dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan

Salah satu teknik pengambilang sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang di anggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, namun jumlah untuk informan peneliti yang mendalami masalah dalam penelitian ini di anggap terlalu banyak sehingga peneliti pengambilan informan melalui teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	H. Jamaluddin. Bsw	JL	Kepala Desa Salassae	1
2	Armin Salassa	AS	Pembina KSPS	1
3	Pennong	PN	Ketua KSPS	1
4	Wahid	WH	Masyarakat	1
5	Bahtiar	BA	Masyarakat	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung sebelum melakukan penelitian, mengenai *Collaborative Governance* Di Desa Salassae, Studi Kasus Pada Komunitas Swadaya Petani Salassae (KSPS) Terkait Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae.

2. Wawancara

Penggunaan teknik ini di maksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang di kaji dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara

dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengambil data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan foto-foto berhubungan dengan objek penelitian dilokasi penelitian untuk melengkapi data tentang Collaborative Governance Di Desa Salassae, Studi Kasus Pada Komonitas Swadaya Petani Salassae (KSPS) Terkait Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae.

F. Teknik Analisis data

Teknik penelitian menggunakan data Kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di Desa Salassae, dan instansi terkait yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Menurut Miles dan Huberman (2007) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang timbul dari tiga rangkaian kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang manual dari

catatan-catatan dilapangan. Penyajian data adalah sekelompok informasi yang tersusun dan dapat memberi sebuah kesimpulan dan tindakan. dengan melihat penyajian-penyajiannya kita akan dapat memperoleh pemahaman tentang keadaan saat itu dan yang harus dilakukan. Menarik Kesimpulan yaitu dimana kita memulai proses pencarian data dengan cara mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

G. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data trigulasi sebagai teknik data yang sifatnya penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah diperoleh. Ada tiga macam trigulasi yaitu,

1. Trigulasi Sumber

Membandingkan dengan cara mengecek ulang Kebenaran sebuah informasi dengan cara menanyakan ke informan lain. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

2. Trigulasi teknik

Menguji kredibilitas data dengan beberapa cara seperti pengecekan data terhadap sumber yang sama namun teknik yang lain.

3. Trigulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, dapat kita dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan sebuah pengecekan dengan cara wawancara dengan informan, observasi, atau teknik lainnya di lain waktu dengan keadaan yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil, serta pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran umum Desa Salassae mencakup keadaan Geografis, kependudukan serta visi misi Desa Salassae . Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai kolaborasi KSPS dengan pemerintah Desa Salassae terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

A. PROFIL DAERAH PENELITIAN

a. Sejarah Desa Salassae

Nama Salassae sudah lama dikenal sebagai tempat istirahat melakukan musyawarah sejak zaman Pemerintahan Belanda dan Jepang, yang waktu itu Salassae adalah tempat /pertemuan Pelantikan Gelarang Bulukumpa Toa, yang dipimpin oleh seorang Gelarang bernama Lantung Dg Paesa yang berasal dari Bulukumpa Laikang atas kekuasaan Kerajaan Gowa yang memerintah beberapa tahun lamanya pada Pemerintahan Karaeng Nojeng selaku Kepala Distrik Tanete Bulukumpa Toa, lamanya 25 tahun sekaligus melantik Gelarang meliputi 7 Gelarang pemangku adat yang sekarang dikenal sebagai Desa, pelantikan Gelarang dilaksanakan di Lokasi Batu Tujua (Batu Pelantikan) Gelarang yang terdiri dari :

1. Gelarang Bulukumpa Toa
2. Gelarang Bulu Lohe

3. Gelarang Bingkarongo
4. Gelarang Bulo-Bulo
5. Gelarang Kambuno
6. Gelarang Jojjolo
7. Gelarang Bontoa

Pada tahun 1960 Kecamatan Tanete, Bulukumpa Toa terjadi gangguan keamanan oleh sisa-sisa gerakan DI/TII , sangat kejam menguasai pedesaan akhirnya Gelarang Bulukumpa Toa yang pada saat itu di pimpin oleh Galla Samiang diserahkan terimakan pada tahun 1961 dari Gelarang Samiang kepada Andi Haeba pada waktu itu Kepala Kecamatan Bulukumpa di jabat oleh Andi Abdul Syukur, satu tahun kemudian Nama Kecamatan Tanete berubah menjadi Kecamatan Bulukumpa yang juga pada waktu itu Salassae masih bernama Bulukumpa Toa, pada Pemerintahan Andi Haeba di tahun 1965 Desa Bulukumpa Toa diintegrasikan ke Desa Bulo-Bulo yang menjadi Pusat Pemerintahan.

Pada tahun 1988 Desa Bulo-Bulo dimekarkan menjadi dua Desa, Yaitu Desa Bulo-Bulo di Pimpin Oleh Jamaluddin Tajibu dan Desa Persiapan Salassae di resmikan oleh Bupati A. Kube Dauda sebagai Desa Defenitif dan Desa Salassae dimekarkan kembali 1 (Satu) Desa yaitu Desa Bontomangiring, 3 Tahun kemudian karena situasi politik di Desa Salassae pada waktu itu sangat tinggi maka pada tahun 1994/1995 akhirnya Kepala Desa Andi Haeba bersama sebagian aparatnya mengundurkan diri dengan hormat, waktu itu AR.Majid menjabat sebagai Pemerintah Wilayah

Kecamatan Bulukumpa, sekaligus menjabat Kepala Desa Salassae, satu bulan kemudian ditunjuk A.T Ahmad sebagai Pymt Kepala Desa Salassae, 3 bulan kemudian A.T Ahmad terpilih dengan suara terbanyak akhirnya dilantik sebagai Kepala Desa Definitf oleh Bupati Bulukumba yang pada waktu itu dijabat oleh (Drs. A. Patabai Pabokori), aktif selama 3 tahun karena ditimpa penyakit akhirnya tidak bisa menjalankan tugasnya sehingga pada tahun 1998 s/d 1999, Camat Bulukumpa yang pada saat itu di Jabat Oleh Drs. A. Salman Nur menunjuk Muh. Basri. T sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Salassae, hingga akhirnya pada bulan September 1999 diadakan pemilihan kepala Desa dan atas dasar kepercayaan Masyarakat Desa Salassae maka terpilihlah Kepala Desa yang Baru yaitu Bapak H. Jamaluddin, Bsw, priode 2000-2008, satu bulan sebelum masa jabatan berakhir , kemudian ditunjuklah Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Hingga akhirnya di adakan Pemilihan Kepala Desa , dan terpilih kembali Bapak H. Jamaluddin, Bsw sebagai Kepala Desa untuk Priode 2009 – 2014, Setelah 2 periode menjabat pada tahun 2014 diadakan pemilihan kepala desa dan terpilih Bapak Cawir sebagai kepala Desa tahun 2014, dan setelah 3 tahun menjabat bapak Cawir meninggal dunia dan akhirnya di adakan pemilihan ulang pada tahun 2017 dan H. Jamaluddin, Bsw terpilih menjadi kepala desa hingga saat ini.

b. Kondisi Umum Desa Salassae

1. Geografis

a) Letak dan Luas Wilayah

Desa Salassae merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Secara administratif, wilayah Desa Salassae memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jojjolo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bonto Haru Kec.
Rilau Ale

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bonto Mangiring

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bulu-Bulo

Luas wilayah Desa Salassae adalah 917,29 Ha yang terdiri dari 111 Ha berupa pemukiman, 756 Ha berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 50,29 ha berupa lahan pekarangan dan Fasilitas umum. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Salassae mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 37 km Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 7 km.

b) Iklim

Iklim Desa Salassae, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Salassae

a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Salassae adalah 3368 jiwa di 5 Dusun dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut;

Tabel 4.1

jumlah penduduk

Nama Dusun	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
Ma'remme	379 jiwa	348 jiwa	727 jiwa
Bonto tangnga	364 jiwa	380 jiwa	744 jiwa
Batu tujua	332 jiwa	329 jiwa	661 jiwa
bolongnge	205 jiwa	223 jiwa	428 jiwa
Batu hulang	379 jiwa	413 jiwa	806 jiwa

Sumber : profil desa salassae 2015

b) Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Salassae tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Keadaan Sosial Desa Salassae

Pendidikan	Jumlah	keterangan
Belum Sekolah	158 jiwa	

Sedang Sekolah	89 jiwa	
Sedang SD	399 jiwa	
Sedang SMP	199 jiwa	
Sedang SMA	158 jiwa	
Sedang D1	7 jiwa	
Sedang D2	20 jiwa	
Sedang D3	116 jiwa	
Sedang S1	178 jiwa	
Sedang S2	1 jiwa	
Tidak Tamat SD	667 jiwa	
Tamat SMP	598 jiwa	
Tamat SMA	497 jiwa	
Tamat D1	21 jiwa	
Tamat D2	49 jiwa	
Tamat D3	35 jiwa	
S1	169 jiwa	
S2	7 jiwa	
Jumlah	3368 jiwa	Laki-laki 1673 jiwa Perempuan 1695 jiwa

Sumber: profil desa salassae 2015

d. Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Salassae memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibu kota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Salassae .

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Salassae

Mata Pencarian	Jumlah	Satuan KK
Petani	873	Jiwa
Pns	45	Jiwa
Pedagang	46	Jiwa
Peternak	222	Jiwa
Bidan	2	Jiwa
Pensiunan TNI/POLRI	1	Jiwa

Sumber profil desa salassae 2015

e. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)

Dari hasil pelaksanaan pendataan Rumah Tangga miskin di Desa Salassae yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan masyarakat (KPMD/K) dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Rumah Tangga Miskin Masing-masing Dusun

Dusun	Jumlah rtm	Keterangan
Maremme	63	
Bonto tangnga	53	
Batu tujua	88	
Bolongnge	23	
Batu hulang	29	

Sumber : profil desa salassae 2015

a) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Salassae sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan Perkebunan.

b) **Pemilikan Ternak**

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Salassae diantaranya ayam/ itik berjumlah 3100 ekor, Kambing 93 ekor, Sapi 757, dan kuda 24 ekor. Hanya kerbau yang tidak menjadi hewan ternak masyarakat Desa Salassae dan jumlah ternak yang paling banyak di Desa Salassae adalah ternak ayam/ itik yaitu 3100 ekor dan ternak yang paling sedikit adalah Kuda 24 ekor.

f. Potensi Khusus Sumber Daya Material

Kondisi Potensi Khusus sumber daya material Desa Salassae Kec. Bulukumpa secara garis besar dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.5
Kondisi Potensi Khusus Sumber Daya Material

No	Jenis potensi	volume	lokasi	
1	Kebun coklat	1900 ha	Satu desa	
2	Kebun merica	1850 ha	Satu desa	
3	Kebun kopi	460 ha	Satu desa	
4	Kebun cengkeh	1950 ha	Satu desa	
5	Sawah	720 ha	Satu desa	
6	Mesin penggiling padi	1 unit	Satu desa	

7	Mesin perontok padi	15 unit	Satu desa	
8	Traktor	35 unit	Satu desa	
9	Bengkel	4 unit	Satu desa	
10	Mobil angkutan	15 unit	Satu desa	

Sumber: Profil Desa Salassae 2015

g. Pemerintahan Desa Salassae

a) Pembagian Dusun di Desa Salassae

Wilayah Desa Salassae dibagi menjadi 5 (Lima) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa dusun tersebut. Pusat Desa Salassae terletak di Dusun BontoTangnga.

Pembagian wilayah Desa Salassae tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Pembagian Dusun Desa Salassae

Pembagian dusun	Jumlah RT/RW	Keterangan
Ma'remme	3RT/ 6RW	
Bonto tangnga	3 RT/ 6 RW	
Batu tujua	2 RT/ 4 RW	
Bolongnge	2 RT/ 4 RW	
<i>Batu hulang</i>	<i>3 RT/ 6 RW</i>	

Sumber: profil desa salassae 2015

b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salassae

Struktur organisasi pemerintah Desa Salassae menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salassae



Sumber : profil desa salassae 2018

h. Potensi dan Masalah Desa Salassae

a) Potensi Desa Salassae

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Salassae terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Daftar Potensi Desa Salassae

BIDANG	POTENSI
1. Pemerintahan	b) Ada aparatur desa c) Ada Kantor Desa d) Ada BPD e) Ada LPMD
2. Pembangunan Desa	f) Ada Swadaya Masyarakat g) Ada Gotong Royong h) Ada Lokasi pekerjaan

<p>3. Pembinaan Kemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) Banyaknya rumah warga j) Banyak areal persawahan yang luas k) Ada rumah yang perlu direnovasi l) Ada kelompok ternak m) Ada gairah untuk menambah pengetahuan n) Ada Siswa berprestasi dalam keluarga miskin o) Ada gairah untuk maju p) Ada lokasi yang siap di gunakan q) Ada kelompok Tani r) Ada Potensi Pariwisata s) Sudah ada LkM t) Sudah ada pengurus BUMDES u) ada kelompok tani wanita v) Ada Usaha Desa w) Ada Banyak Pemuda x) Ada Banyak Perempuan y) Ada banyak lokasi yang siap gunakan z) Ada Swadaya Masyarakat aa) Ada Gotong Royong
--	--

<p>4. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>bb) Ada Lembaga PKK</p> <p>cc) Ada Keinginan memiliki PKK yang mapan</p> <p>dd) Ada kader Posyandu</p> <p>ee) Ada Guru TKA/TPA</p> <p>ff) ada banyak atlet muda</p> <p>gg) Ada Banyak Pemuda</p> <p>hh) Ada Aparatur Desa</p> <p>ii) Ada Banyak perempuan</p> <p>jj) Ada semangat berlatih</p>
-----------------------------------	---

Sumber : profil desa salassae 2015

i. Masalah Desa Salassae

Berdasarkan pengkajian keadaan desa, masalah yang terdapat di Desa Salassae tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Daftar Desa Salassae

BIDANG	MASALAH
---------------	----------------

<p>1. Pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none">• perlu perbaikan kantor desa• perlu peningkatan kesejahteraan desa dan lembaga• tidak semua aparat tahu Komputer• pembangunan Gapura/ identitas Desa• Desa belum memiliki jaringan wifi / internet
<p>2. Pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none">• Jalan perlu dirabat betong• Jembatan penghubung antar desa• Sarana irigasi perlu dibangun• permodalan untuk• BUMDESTambahan modal bagi para usaha kecil• kelompok pemuda tidak memiliki usaha-usaha produktif• kurangnya modal usaha tani• Belum ada Lumbung pangan desa• Belum ada gedung TKA• pada musim pancaroba banyak warga yang terjangkit penyakit diare dan

<p>3. Pembinaan Kemasyarakatan</p>	<p>DBD</p> <ul style="list-style-type: none">• pada musin hujan banyak warga yang menderita batukbatuk• Kapasitas SDM Kader posyandu kurang memadai• Perlengkapan posyandu yang kurang• masih banyak warga miskin yang belum memiliki BPJS• TKA,TPA,TK membutuhkan perlengkapan untuk belajar• Masih ada rumah yang belum memiliki instalasi listrik• alat untuk latihan masih kurang• PKk tak memiliki usaha yang produktif dan bernilai tinggi• Kurangnya lampu jalan di desa• Guru honor TKA/TPA masih sangat minim• Honor kader posyandu masih minim• Menurunnya rasa kegotong royongan dan sosial masyarakat
--	--

<p>4. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Karang Taruna yang tidak optimal • Lapangan sepak bola kurang penataan • Banyak lapangan Volly yang kurang terpelihara • Belum optimalnya Penyuluhan Kesehatan di desa • Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Pemuda • Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Perempuan • Pelatihan keterampilan bagi kelompok Tani Dan wanita
-----------------------------------	---

Sumber: profil desa salassae 2015

j. Visi dan Misi Desa Salassae

a) Visi Desa Salassae

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Salassae dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Salassae tahun 2014 -2019 adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri dan Berdaya Guna Melalui Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan”

Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Salassae yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.
2. Mandiri, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Salassae yang memiliki kemandirian dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, Peningkatan kesejahteraan dan pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat.
3. Berdaya Guna, yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berdaya guna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Dasar perdesaan, yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan peningkatan layanan sarana dan prasarana Desa yang menunjang peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

b) Misi Desa Salassae

Untuk mencapai Visi: “ Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri dan Berdaya Guna Melalui Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Pedesaan” Desa Salassae telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal untuk kemandirian ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana umum.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna.
4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

k. Sejarah Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)

KSPS atau Komunitas Swabina Pedesaan Salassae berdiri pada November 2011, berawal dari kerisauan dari masyarakat setempat yang kebanyakan lebih memilih merantau daripada menetap di kampungnya mengurus sawa dan lading mereka. Disinilah seorang bernama Armin Salassa mulai terketuk hatinya untuk memperhatikan kampung halamannya dan masyarakat sekitar, dia bukan petani dan juga tak mempunyai sawah tapi bermodalka pengalaman bekerja di bina desa di tingkat nasional dan berbagai *Non Organization Governman* (NGO), dan sebagai mantan aktifis

semasa mahasiswa, armin menularkan cara kerja kelompok dan terorganisir pada petani, dia memboyong para petani dan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mendirikan sebuah lembaga pertanian yang bukan sekedar pertanian biasa, namun merupakan pertanian organik yang ramah lingkungan.

Mereka lalu bersama sama memecahkan masalah pertanian yang mereka hadapi bersama, dengan beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Di Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) mereka di bina untuk bagaimana membuat pupuk alami serta kompos dan bibit padi dan yang lainnya yang berhubungan dengan pertanian organik. Komunitas ini mengedepankan sistem ramah lingkungan dalam bertani, dan tujuan dari komunitas ini adalah bagaimana bisa memakmurkan masyarakat petani agar mereka bisa berdaulat di sektor pangan.

KSPS kini telah meraih beberapa penghargaan baik di tingkat kabupaten bahkan ke tingkat nasional, dan tak lama ini KSPS meraih tropi PROKLIM (program kampung iklim) dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia.

B. Bentuk *Collaborative Governance* Terkait Kedaulatan Pangan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Collaborative Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan yang sama, atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. pihak-pihak

tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Adapula masing-masing jawaban informan pada tiap indikator bentuk *Collaborative Governance* terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Commitment to a common purpose

Pemerintahan kolaboratif merupakan alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintahan kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

Data yang dihimpun dari informan untuk indikator *Commitment to a common purpose* jelas tampak pada jawaban informan tersebut, berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan

Commitment to a common purpose dalam sistem *Collaborativ Governance*

sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk *Commitment to a common purpose* yang dilakukan pemerintah dengan KSPS dalam sistem *Collaborativ Governance* terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae” terkait dengan komitmen dalam kedaulatan pangan bersama pemerintah Desa Salassae dan KSPS masih sebatas peningkatan sumber daya manusia dalam hal pertanian, seperti contohnya memberikan pendidikan pertanian organik yaitu bagaimana mereka bisa membuat pupuk kompos dan benih sendiri kepada petani yang tenaga pendidiknya sendiri dari KSPS dan didanai oleh pemerintah Desa Salassae sendiri. (wawancara dengan JL Kepala Desa Salassae pada tanggal 26 juni 2018).

Berdasarkan dengan wawancara kepala Desa Salassae mengenai komitmen yang dijalani bersama KSPS dalam tujuan positif yakni untuk terciptanya kedaulatan pangan yaitu dengan memberikan para petani bekal untuk bertani dalam konteks pendidikan, hal ini merupakan langkah cerdas untuk kesuksesan para petani sehingga pada akhirnya mereka bisa berdaulat dalam hal pangan atau lebih tepatnya kedaulatan pangan bisa mereka raih dengan cara bertani dengan model pertanian organik . pernyataan tersebut di dukung dari informan lain yaitu pembina Komunitas Swabina Pedesaan Salassae dengan pernyataan sebagai berikut :

“Dalam komitmen kearah yang positif kami kedepan yaitu penguatan organisasi tani dan pengembangan praktek dan produksi pertanian alami dan komitmen kami yakni 3 tahun kedepan seluruh masyarakat desa salassae akan bertani dengan model pertanian alami dan tentu ini merupakan kedaulatan pangan sesungguhnya. (wawancara dengan bapak AS selaku Pembina KSPS dan Sekjen

Federasi petani Sulawesi selatan atau FPSS pada tanggal 1 juli 2018)

Terkait dengan wawancara diatas bahwa Pembina KSPS ini menyatakan bahwa bahwa komitmen mereka kedepan yaitu mereka akan menguatkan atau mengembangkan organisasi tani dan mengembangkan praktek serta produksi dari pertanian organik sehingga tiga tahun akan datang masyarakat desa salassae semua akan beralih dari pertanian kimia menuju pertanian organik yang notabenenya sebuah model pertanian yang hemat biaya sehingga ini merupakan kunci untuk para petani menjadi berdaulat. Hal demikian juga sama dengan pernyataan PN selaku ketua KSPS sekaligus masyarakat Desa Salassae dan pernyataanya sebagai berikut

“komitmen kami kedepan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa Salassae dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitu lebih memperkuat organisasi kami dengan cara merekrut lebih banyak petani ke KSPS dan memberikan pelatihan pelatihan dalam pengelolaan pangan dengan konsep dari pangan kembali ke pangan. (wawancara dengan PN, selaku ketua KSPS pada tanggal 29 juni 2018).

Dalam wawancara ini ketua KSPS menyatakan komitmennya kedepan dengan pemerintah desa salassae dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitu dengan merekrut para petani untuk bergabung dengan kspS sehingga dengan mudah mereka memberikan pelatihan secara rutin dan terstruktur dalam dalam para petani organik, sehingga dengan perekrutan tersebut organisasi KSPS lebih kuat disegi sumber daya manusianya sehingga mereka bisa mengelolah pangannya dengan baik dengan konsep

pertanian yang ramah lingkungan dan tidak mengurangi kualitas lahan pertaniannya atau bisa disebut metode pertanian berkelanjutan. Pernyataan tersebut jugadi dukung oleh informan WH selaku petani organik dan masyarakat desa salassae yang menyatakan:

“ kami kedepan akan senantiasa menjaga model pertanian organik ini dengan mengikuti pelatihan pengelolaan pertanian organik sehingga lahan pertanian kami lebih baik sehingga kesuburan lahan pertanian kami bisa terjaga kedepan sampai ke anak cucu kami dan kami yakin dengan cara ini kami akan berdaulat di segi pangan. (wawancara dengan WH selaku petani organik dan masyarakat Desa Salassae pada tanggal 29 juni 2018)”

Hal serupa juga di ungkapkan oleh informan BA sebagai pelaku pertanian organik.

“untuk hal komitmen kami sebagai masyarakat kami sepenuhnya mengikut kepada KSPS, baik itu di metode pertaniannya maupun program lembaga lainnya, karna kami yakin KSPS lah yang tau persis keadaan lahan perkebunan kami. (wawancara dengan bapak BA pada tanggal 14 agustus 2018)”

dengan pernyataan dari dua informan tersebut yang selaku masyarakat petani desa Salassae sekaligus petani organik ini tentu mewakili dari petani Desa Salassae, bahwasanya dengan bergabung dengan ksps dengan konsep peranian organik mereka mereka berkomitmen kedepan akan menjaga konsep pertanian organik, karna mereka yakin dengan konsep inilah lahan pertanian mereka bisa terjaga hingga kemasa yang akan datang sehingga mereka para petani bisa berdaulat di segi pangan. Dan jika di telaah lebih dalam lagi dari hasil

wawancara diatas kita dapat melihat kepercayaan kepada KSPS dari masyarakat sangat tinggi.

Berdasarkan dari pernyataan beberapa informan diatas dapat di simpulkan bahwa *Commitment to a common purpose* pada *collaborative governance* di desa salassae *Commitment to a common purpose* (komitmen untuk tujuan bersama yang bersifat positif), yaitu: penguatan sumber daya manusia dalam pertanian organik seperti pemberian sarana pendidikan untuk para petani organik, penguatan organisasi petani dalam bentuk pengembangan kapasitas para petani organik dan para petani mempertahankan model pertanian organik dengan cara mengikuti dan menjalankan bentuk - bentuk pertanian organik yang di usulkan oleh lembaga KSPS. Hal ini relevan dengan apa yang di sampaikan oleh Milward dan Provan dalam (Mutiarawati, 2017) yaitu *Commitment to a common purpose* ialah jaringan bisa ada karna berkomitmen terhadap suatu tujuan yang positif.

b. Trust among the participants

Trust among the participants kepercayaan antara pelaku atau peserta kolaborasi yang mempunyai hubungan sosial atau profesional yang yakin bahwa para partisipan dapat menjaga informasi atau usaha-usaha dari pemerintah lainya untuk mencapai suatu tujuan dalam jaringan tersebut. Data yang dihimpun dari informan untuk indikator *Commitment to a common purpose* jelas tampak pada jawaban informan tersebut, berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan *Trust*

among the participants dalam sistem *Collaborativ Governance* sebagai berikut :

”Bagaimana bentuk kepercayaan yang anda berikan kepada kspks untuk menjalankan program program kedaulatan pangan, apapun yang mereka lakukan terkait dengan pertanian alami kami selaku pemerintah desa mendukung dan kami sepenuhnya memberikan kepercayaan tersebut kepada kspks dalam menjalankan program tersebut, karna merekalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas program tersebut (wawancara dengan JL selaku kepala Desa Salassae pada tanggal 4 juli 2018).

Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwasanya kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah Desa Salassae kepada lembaga KSPS sanyatlah besar dalam hal menjalankan program dari lembaga, serta pemerintah Desa Salassae memberikan tanggung jawab penuh kepada lembaga ini untuk mengurus masalah masalah pertanian organik yang ada di Desa Salassae. Tentu hal ini sangat di butuhkan untuk sebuah bentuk kerjasama, dengan adanya kepercayaan penuh untuk mengurus para petani organik. Hal tersebut di dukung dengan pernyataan informan PN selaku ketua lembaga KSPS menyatakan:

“Soal kepercayaan pemerintah Desa Salassae memberikan kepercayaan penuh pada kami baik itu di segi pengelolaan lembaga maupun segi pertanian organik. Bahkan, mereka berencana untuk membuat peraturan desa terkait pertanian organik ini. (Wawancara dengan PN selaku ketua lembaga KSPS pada tanggal 29 juni 2018).

Berdasarkan dari pernyataan dari ketua lembaga kspks bahwasanya pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada mereka terkait kerjasama ini baik itu di segi pengelolaan lembaga maupun di segi

pengaturan pertanian organik dan atas dasar kepercayaan ini, pemerintah Desa Salassae akan membuat sebuah PERDES atau peraturan desa terkait pertanian alami atau pertanian organik ini. Pernyataan di atas didukung pula dari informan AS selaku Pembina KSPS beliau menyatakan:

“kepercayaan penuh di berikan dari pemerintah Desa Salassae kepada KSPS terkait kedaulatan pangan, ini terlihat dari ketika ada sejenis kegiatan baik itu bersifat pembinaan ataupun kegiatan lain yang mencakup dari masalah pertanian organik ini, pemerintah desa tak segan untuk mendanai kegiatan tersebut” (wawancara dengan AS selaku Pembina KSPS pada tanggal 28 juni 2018).

Dari hasil wawancara dari informan di atas, ini bisa kita lihat bahwa kepercayaan antara pemerintah Desa Salassae dengan lembaga KSPS cukup besar ini dapat kita lihat pendanaan ketika ada sebuah kegiatan pembinaan maupun yang lainnya yang mencakup tentang pemberdayaan masyarakat di segi kedaulatan pangan maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Dan pandangan masyarakat pun demikian menurut informan WH selaku masyarakat petani di Desa Salassae mengatakan:

Soal kepercayaan kami sebagai masyarakat dengan KSPS itu sendiri sangat mempercayakan metode pertanian yang mereka usulkan karena di segi kesehatan pertanian organik jauh lebih sehat di banding pertanian konvensional dan selain itu model pertanian ini tidak merusak tanah sehingga kami bisa bertani dengan berkelanjutan. (wawancara dengan WH selaku masyarakat petani di Desa Salassae pada tanggal 1 juli 2018).

Pernyataan dari warga tersebut merupakan salah satu contoh kepercayaan masyarakat kepada lembaga KSPS yang notabene sebagai komunitas petani organik yang memberi mereka ilmu dan pendidikan

serta pemahaman tentang keuntungan bertani dengan model alami atau organik selain dengan hasil pertaniannya yang jauh lebih sehat dari pertanian konvensional lahan untuk mereka dapat terjaga ke suburannya.

Dari hasil dari wawancara terhadap beberapa informan di atas dapat di simpulkan bahwa *Trust among the participants* yang terdapat pada *collaborative governance* di desa salassae ialah dukungan menjalankan program KSPS, pengelolaan lembaga, pendanaan kegiatan lembaga, dan mengikuti metode pertanian. Hal ini relevan dengan apa yang di kemukakan oleh Milward dan Provan dalam (Mutiarawati, 2017) bahwa *Trust among the participants* adalah kepercayaan antara pelaku atau peserta yang mempunyai hubungan sosial atau profesional yang yakin bahwa para partisipan dapat menjaga informasi atau usaha-usaha dari pemerintah lainya untuk mencapai suatu tujuan dalam jaringan tersebut.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* di Desa Salassae terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kegiatan, suatu kegiatan dapat terlaksana dengan semestinya ataupun tidak terlaksana sebagaimana mestinya, faktor pendukung ini bisa di pengaruhi baik dari pihak Pemerintah, maupun yang terkait dalam ruang lingkup sistem kerjasama atau *Collaborativ Governance*, Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Salassae Bapak JL, perihal faktor pendukung yang

memicu atau mempengaruhi dalam pembentukan *Collaborative Governance* terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut :

Hal yang mempengaruhi sehingga terjadi kerja sama antara pemerintah Desa Salassae dengan KSPS itu sendiri ini timbul dari kesadaran kedua belah pihak, dan kalau dari pihak pemerintah Desa Salassae kami melihat potensi KSPS untuk membesarkan Desa Salassae sangatlah besar selain itu, program program yang ditawarkan oleh lembaga pertanian alami ini (KSPS) sangatlah bagus untuk masyarakat Desa Salassae. (wawancara dengan bapak JL selaku kepala Desa Salassae pada tanggal 26 juni 2018).

Dari pernyataan bapak JL selaku kepala Desa Salassae, bahwa faktor yang mempengaruhi sehingga terjalin kerja sama antara pemerintah desa dengan komonitas KSPS karna adanya dorongan dari kesadaran kedua belah pihak dan pemerintah Desa Salassae berkata jika KSPS bekerja sama dengan pemerintah Desa Salassae ini merupakan potensi terbesar mereka untu memajukan Desa Salassae karna KSPS ini merupakan komonitas petani yang cukup di kenal namanya di kalangan masyarakat khususnya masyarakat petani yang ada Di Kabupaten Bulukumba maupun yang ada di Sulawesi Selatan, selain dari itu pemerintah Desa Salassae juga melihat bahwa program program dari komonitas ini merupakan program yang baik dan tentunya pro kepada rakyat. Dari hasil pemaparan di atas hal tersebut terdukung dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh pihak informan lembaga KSPS yang menyatakan bahwa :

Faktor pendukung terjadinya *collaborative governance* yaitu dari dorongan dari internal lembaga dan masyarat petani Desa Salassae kami bahwasanya suatu lembaga bisa berdiri kokoh jika ada dukungan atau kerja

sama dengan pemerintah. (Wawancara dengan PN selaku ketua lembaga KSPS Pada Tanggal 3 Juli 2018).

Penjelasan di atas menjelaskan tentang pernyataan ketua lembaga KSPS bawa faktor yang mempengaruhi sehingga timbul *Collaborative governance* di antara pemerintah Desa Salassae dengan lembaga KSPS yaitu adanya dorongan dari dalam lembaga dan masyarakat Desa Salassae untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah desa salassae sehingga KSPS lebih kokoh dan bisa mensejahterakan masyarakat.

Dari hasil dari wawancara terhadap beberapa informan di atas dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dalam *collaborative governance* ialah kesadaran dari pihak *collaborative governance* dan dorongan dari internal lembaga serta masyarakat petani organik Desa Salassae. Hal tersebut relevan apa yang di kemukakan oleh Desave bawa faktor pendukung dalam *collaborative governance* ialah *networked structure, Commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, Access to authority, Distributive accountability and responsibility, Information sharing* dan *Access to resources*.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat di artikan sebagai hal yang mempengaruhi suatu kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik atau dalam artian tidak sejalan dengan apa yang di inginkan, faktor penghambat ini dapat di pengaruhi baik Pemerintah, Masyarakat, dan *stakeholder* yang terikat

dalam ruang lingkup kerjasama atau Kolaborasi tersebut, terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae Dan berdasarkan hasil pengamatan atau hasil Wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Salassae yang mengatakan bahwa ada hal yang menghambat dalam sistem *Collaborativ Governance* ini atau sistem kerjasama tersebut yang mengatakan bahwa:

Faktor yang menghambat kerja sama ini adalah kurangnya komunikasi langsung antara para pengurus ataupun orang-orang dari lembaga KSPS dengan pemerintah desa mengenai program-program mereka. (wawancara dengan bapak JL selaku kepala Desa Salassae pada tanggal 26 juni 2018).

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa faktor penghambat dari kerja sama pemerintah Desa Salassae dengan lembaga KSPS adalah kurangnya musyawarah dari kedua belah pihak, pernyataan diatas ini didukung dari informan lembaga KSPS menyatakan:

Faktor yang menghambat kerja sama atau *collaborative governance* terkait kedaulatan pangan antara KSPS dengan pemerintah Desa Salassae yaitu kurangnya partisipasi aktif dan kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah desa atau lemahnya sumber daya manusia (SDM) terkait pentingnya kedaulatan pangan bagi setiap masyarakat.(wawancara dengan PN selaku ketua lembaga KSPS pada tanggal 3 juli 2018).

Disini kita dapat melihat dari penjelasan informan dari KSPS bahwa faktor pengahmbat kerja sama antara pemerintah Desa Salassae dengan lembaga KSPS ini karna kurangnya pemahaman aparat pemerintah Desa Salassae terkait kedaulatan program program lembaga KSPS.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di katakan bahwa dalam satu pelaksanaan sistem *Collaborative governance* atau kerjasama

tersebut terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem *Collaborativ Governance*, dan adanyalah faktor penghambat dan pendukung ini yang mempengaruhi kerja sama pemerintah dan KSPS terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Dari hasil dari wawancara terhadap beberapa informan di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dalam *collaborative governance* terkait kedaulatan pangan di Desa Salassae ialah kurangnya komunikasi langsung antara pemerintah desa dengan KSPS dan kurangnya partisipasi aktif serta kurangnya pemahaman dari aparatur pemerintah desa atau lemahnya sumber daya manusia (SDM) terkait pentingnya kedaulatan pangan bagi setiap masyarakat.

Hal ini relevan dengan apa yang di kemukakan oleh Newman dkk (2004) menyatakan bahwa sejumlah faktor yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder*. Partisipasi merupakan hal yang penting, menurut Newman dkk (2004) temuan kami membuka sejumlah isu tentang kendala pada *collaborative governance*. Untuk memahami kendala ini kami menyarankan ada kebutuhan untuk mencari inisiatif partisipasi dalam konteks kebijakan pemerintah, untuk mengeksplorasi cara di mana kebijakan tersebut di interpretasikan dan disahkan oleh para aktor strategis di organisasi lokal dan memeriksa persepsi anggota forum deliberatif sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran *Collaborativ Governance* di desa Salassae sebagai berikut:
 - a. *Commitment to a common purpose* (komitmen untuk tujuan bersama yang bersifat positif), meliputi: Penguatan sumber daya manusia dalam pertanian organik seperti pemberian sarana pendidikan untuk para petani organik, Penguatan organisasi petani dalam bentuk pengembangan kapasitas para petani organik, Mempertahankan model pertanian organik.
 - b. *Trust among the participants* (kepercayaan antara pelaku kerjasama) meliputi: Dukungan menjalankan program KSPS, seperti pembuatan pupuk organik dan kompos, Pengelolaan lembaga, seperti pembentukan struktur keorganisasian dan perekrutan anggota, Pendanaan kegiatan lembaga seperti pendanaan fasilitas pendidikan dan pelatihan petani organik, Metode pertanian organik seperti mengikuti pelatihan-pelatihan tata cara bertani dengan alami.
2. Faktor yang mempengaruhi kolaborative governance di desa Salassae yaitu: Kesadaran para *steacholder* yang menjalani kolaborasi dan dorongan dari internal lembaga KSPS maupun masyarakat petani organik.

B. SARAN

1. Bahwa bentuk *collaborative governance* dalam mewujudkan kedaulatan pangan di desa Salassae meliputi:

- a. *Comitmen to a common purpose* yaitu : penguatan sumber daya, penguatan organisasi, mempertahankan model pertanian organik. Maka dari itu disarankan kepada setiap *steacholder* yang terkait dengan *collaborative governance* bisa menjaga komitmen tersebut agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan bersama.
 - b. *Tush among the partisipants* berupa : dukungan menjalankan program lembaga, pengelolaan lembaga, metode pertanian organik. Maka dari itu di sarankan kepada setiap *steacholder* yang terkait dengan *collaborative governance* bisa memperkokoh kepercayaan tersebut, sehingga dapat membangun kepercayaan baru dalam *collaborative governance* tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* di desa Salassae meliputi: kesadaran para *steacholder* yang menjalani *collaborative govrnance*, dorongan dari internal lembaga KSPS maupun masyarakat petani organik. Faktor ini di harapkan dapat di pertahankan agar dapat terwujud kedaulatan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1
- BPS Kabupaten Bulukumba. 2018. *Bulukumbakab.Bps.Go.Id*. Di Akses Pada Tanggal 20 Maret 2018.
- Baroroh, Kiromim. 2009. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus Di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)*. *Dimensia*, Volume 3, No. 1
- Denny Irawan. 2017. *Collaborative Governance Pemerintahan Colaborative Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya*. *Kebijakan Dan*, Volume 3 No 3 Manajemen Publik
- Dewa Ketut Sandra Swastika. 2017. *Membangun Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dsari Kemiskinan*. *Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol 4. No.2
- Gempitanews. 2017. *Pertanian Padi Sebagai Ekonomi Lokal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan Yang Berorientasi Ekspor*. [Http://Gempitanews.Com](http://Gempitanews.Com). Di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2018.
- Hasbiullah, Sapriadi. 2015. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba*. *Iqtisaduna*, Volume 1 Nomor 1
- Kurniasih, Denok , Paulus Israwan Setyoko, Dan Moh. Imron. 2017. *Jurnal Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Bayumas*. *Soaiohumaniora*, Vol 19. No. 1
- Miles, Mattew B Dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Metode-Metode Baru Terjemahan Tjetjep Rohadi Rohisi. Jakarta, Universitas Indonesia
- Mutiarawati, Tika, Sudarmo. 2017. *Collaborative Governance, Dalam Penanganan Rob. Di Kelurahanbandengan Kota Pekalongan*. *Jurnal Wawancara Publik*. *Pekalongan. Wacana publik*. Vol 1. No.2
- Newman, Janet, dkk. 2004. *Public Participation and Collaborative Governance*. *Jnl Soc*. Vol. 33. No 2.

SPI. 2015. Kedaulatan Pangan. www.Spi.Or.Id/Isu-Utama/Kedaulatan-Panga/. Di Akse Pada Tanggal. Di akses pada tanggal 25 Maret 2018

Sekretaris Desa Salassae. Profil Kabupaten Bulukumba Dan Profil Desa Salassae

Suragih, Henry. 2015. *Perjuangan Petani Dalam Menegakkan Kedaulatan Pangan*. Bogor: Spi

Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K.Sejati, Dan Miftahul Aziz.. *Jurnal Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Bogor. 2015.

Werkhseiser, Ian. 2014. *Food Sovereignty, And Self-Organised Community Viability*. Interdisciplinary environmental review, vol. 15. No 2/3

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana.

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 0882 /FSP/A.1-VIII/VI/1439 H/2018 M
Jumlah : 1 (satu) Eksamplar
Tipe : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

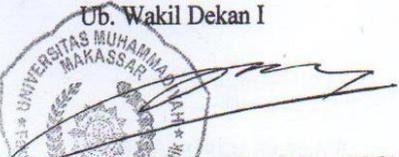
Nama Mahasiswa : Asran
Stambuk : 105640197714
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Komunitas Swadaya Petani Salassae Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
Judul Skripsi : *"Collaborative Governance di Desa Salassae (Studi Kasus Pada Komunitas Swadaya Petani Salassae (KSPS) Terkait Kedaulatan Pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 07 Juni 2018

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM 1084 366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: dp3munismuh@plasma.com



BAR-PT

Nomor : 1289/Izn-5/C.4-VIII/VI/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Ramadhan 1439 H

07 June 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan

di

Bulukumba

السنة الثامنة عشر

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0682/FSP/A.1-VIII/VI/1439 H/2018 M tanggal 7 Juni 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ASRAN

No. Stambuk : 10564 01977 14

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Collaborative Governance di Desa Salassae (Studi Kasus pada Komunitas Swadaya Perani Salassae (KSPS) terkait Kedaulatan Pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Juni 2018 s/d 9 Agustus 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السنة الثامنة عشر

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Ahubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 25 Juni 2018

Nomor : 289/DPMPTSP/VI/2018
Aspek :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Bulukumba Kab. Bulukumba
2. Kepala Desa Salassae Kec. Bulukumpa
Di
- Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/392/Kesbangpol/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ASRAN**
Nomor Pokok : **10564 01977 14**
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
Alamat : **JL. SULTAN ALAUDDIN 3 Lr. II NO. 3 MAKASSAR**

Bermaksud melakukan penelitian / pengambilan data Di Kecamatan Bulukumpa dan Desa Salassae Kab.Bulukumba dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul "**COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA SALASSAE (STUDI KASUS PADA KOMUNITAS SWADAYA PETANI SALASSAE (KSPS) TERKAIT KEDAULATAN PANGAN DI DESA SALASSAE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA)**" yang akan berlangsung pada tanggal 09 Juni s/d 09 Agustus 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampul hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/ pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangkat : Pembina Utama Muda
: 19610702 199003 2 002

mbusan:
Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;



KECAMATAN BULUKUMPA

Kantor : Jl. Kemakmuran No. 12 A Tlp. (0413) 2586255 Tanete

Tanete, 25 Juni 2018

Nomor : 070/107/BLKP/VI/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada
Yth. Kepala Desa Salassae
Di-
Tempat.

Berdasarkan surat kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 289/DPMPTSP/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018, Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada saudara yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **AS RAN**
Nomor Pokok : 105640197714
Program Studi : Ilmu Pemerintahan pada UNISMUH Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin 3 Lr. II No. 3 Makassar

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa dalam rangka pengambilan data untuk penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan Judul : " COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA SALASSAE (STUDI KASUS PADA KOMUNITAS SWADAYA PETANI SALASSAE (KSPS) TERKAIT KEDAULATAN PANGAN DI DESA SALASSAE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA) ". Yang akan berlangsung pada Tanggal 09 Juni s/d 09 Agustus 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan Kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setempat
3. Peneliti / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) Eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) Eksamplar hasilnya kepada Camat Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
6. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian / pengumpulan data dimaksud belum selesai.

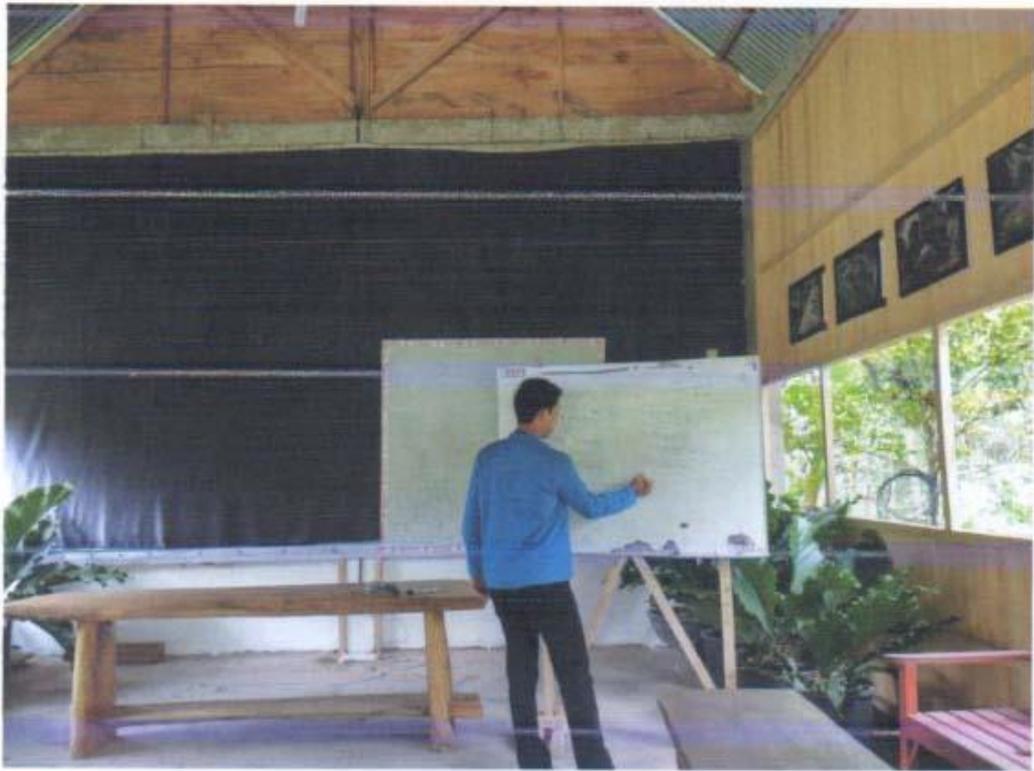
Demikian Surat Izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT BULUKUMPA











RIWAYAT HIDUP



ASRAN, lahir di Sinjai, Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 20 Agustus 1995, Anak kelima (5) dari delapan (8) bersaudara yang merupakan anak dari pasangan bapak Ansar dan ibu Murniati.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SD Negeri 143 Korong dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Terbuka Sinjai Selatan 2 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMA negeri 1 tellulimpoe kabupaten sinja namun tidak tamat, dan melanjutkan ke Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Sinjai (Paket C) dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada program strata 1 (S1) keperguruan tinggi di salah satu Universitas swasta di Makassar. Pada tahun yang sama penulis diterima di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muammadiyah Makassar melalui jalur tes.